PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559
FAX. 0741 – 445293
Home Page :www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-A/393/Kp.04.6/III/2019 Jambi, 27 Maret 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 4 Lembar
Perihal : Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Meneruskan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019 perihal seperti pokok surat diatas, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar saudara/i segera membentuk tim dalam membuat dan menghitung kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan unit kerja saudara/i berupa peta jabatan, analisa jabatan dan analisa beban kerja.

2. Perhitungan tersebut dimaksud agar disusun dengan cermat sesuai data riil, memperhatikan pola karir bagi calon serta pemangku jabatan fungsional dan mencerminkan kebutuhan organisasi yang didasarkan pada beban kerja tahun sebelumnya (2018) sesuai link yang tersebut dalam surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tersebut.

3. Hasil perhitungan kebutuhan jabatan fungsional tersebut berbentuk softcopy/scan yang telah ditanda tangani oleh tim/pejabat yang berwenang dan distempel (e-doc) meliputi sk penunjuk tim penghitungan kebutuhan jabatan fungsional, surat pengantar dari pimpinan satuan kerja, peta jabatan, analisa jabatan, dan analisa beban kerja jabatan fungsional yang diupload melalui link ***shorturl.at/KMZ18*** paling lambat tanggal 15 April 2019 pukul 16.00 WIB.

4. Agara data tersebut juga ditembuskan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui email ***kepegawaianptajambi@gmail.com***.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

Wassalam,
Wakil Ketua

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.
NIP. 19580705.198603.1.001

Tembusan Yth.
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi (sebagai laporan)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019 — 18 Maret 2019
Lampiran : 4 (Empat) Lembar
Hal : Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional

Yth. Sdr/i
1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Pengadilan Militer Utama;
3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;
4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan;

di –
Tempat

Sehubungan dengan adanya perpanjangan batas waktu pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing sampai dengan 6 April 2021 dan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 huruf b Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, dengan ini disampaikan bahwa agar terlaksananya pengangkatan jabatan fungsional di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya melalui mekanisme Penyesuaian/ Inpassing, untuk itu diminta kepada Saudara/i agar segera membentuk tim guna membuat dan menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan unit kerja Saudara berupa peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Perhitungan kebutuhan jabatan fungsional dimaksud agar disusun dengan cermat, sesuai data riil, memperhatikan pola karir bagi calon serta pemangku jabatan fungsional dan mencerminkan kebutuhan organisasi yang didasarkan pada beban kerja tahun sebelumnya.

Hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional tersebut berbentuk *softcopy*/ scan yang telah ditandatangani oleh tim/ pejabat yang berwenang dan distempel (e-doc) meliputi SK penunjukan tim penghitungan kebutuhan jabatan fungsional, surat pengantar dari pimpinan satuan kerja, peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja jabatan fungsional. Data tersebut agar di*upload* melalui link ***shorturl.at/KMZ18*** *) paling lambat tanggal **15 April 2019 pukul 16.00 WIB**.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, telp. (021) 384 3348 ext 422 / 734.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung

A.S. Pudjoharsoyo

Lampiran : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 395/SEK/KP.04.6/3/2019
Tanggal : 18 Maret 2019
Hal : Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional

I. Regulasi dan Pedoman

NO	PERATURAN	LINK TERLAMPIR
1	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analis Jabatan	https://tinyurl.com/permenpan33-2011
2	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan	https://tinyurl.com/PerkaBKN-12
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan	https://tinyurl.com/permenpan34-2011
4	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian	https://goo.gl/oHgLjT
5	Tata Cara Penghitungan Kebutuhan Jumlah Auditor	shorturl.at/cnptV
6	Peraturan Kepala Arsip Nasional RI nomor 10 Tahun 2009 tentang Perdoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis	https://goo.gl/iezbMn
7	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	https://bit.ly/2VHAAZs; https://bit.ly/2H1v3to
8	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Assessor SDM Aparatur	https://goo.gl/7RqVWz
9	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Perencana	https://bit.ly/2tOzHSS
10	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Peneliti	https://goo.gl/tBQr3t | https://goo.gl/WPKCPG
11	Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Penerjemah	shorturl.at/KMOTX
12	Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas	https://goo.gl/8R5ANm
13	Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 291 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer	https://goo.gl/uC7p5c
14	Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan	https://bit.ly/2Hiz6k8 | https://goo.gl/92cP8u *
15	Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Widyaiswara	shorturl.at/flnDG

Keterangan :
* : Pasal 13, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyatakan bahwa Jumlah koleksi pada setiap perpustakaan umum atau khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul

II. **Unduh Formulir Isian dan simulasi perhitungan**

No	Jenis Formulir	Link Terlampir
1	Formulir Isian Informasi Jabatan (ANJAB)	https://bit.ly/2XOaCF8
2	Simulasi Perhitungan Beban Kerja Analis Kepegawaian	http://tiny.cc/ABKankep
	Simulasi Perhitungan Beban Kerja Arsiparis	http://tiny.cc/ABKArsiparis
	Simulasi Perhitungan Beban Kerja Pustakawan	http://tiny.cc/ABKPustakawan
	Simulasi Perhitungan Beban Kerja Pranata Komputer	http://tiny.cc/ABKPrakom
	Simulasi Perhitungan Beban Kerja Perencana	http://tiny.cc/ABKPerencana
	Simulasi Perhitungan Beban Kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	✈http://tiny.cc/ABKPPBJ_ULP (untuk ULP) ✈http://tiny.cc/ABKPPBJSatker (Untuk Satker)
3	Formulir isian jabatan fungsional	shorturl.at/koQ67

Keterangan :

¤ **Petunjuk Teknis Pengisian simulasi perhitungan beban kerja Analis Kepegawaian**

1. Mengumpulkan beban kerja unit/satker tahun berjalan mulai dari perencanaan kepegawaian sampai dengan pemberhentian;
2. Mengisi beban kerja tersebut ke dalam kolom volume kegiatan (kolom 6);
3. Beban kerja yang sudah terisi tersebut akan otomatis sudah terisi sesuai jenjang jabatan (mulai dari analis kepegawaian pelaksana s/d analis kepegawaian madya);
4. Penghitungan tersebut berdasarkan real beban kerja unit/ satker;

¤ **Petunjuk Teknis Pengisian simulasi perhitungan beban kerja Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, Perencana**

1. Lembar isian cukup diisi pada sheet All Terampil dan All Ahli;
2. Kolom yang diinput adalah kolom 6 (enam);
3. Jumlah volume diisi dari kegiatan yang dikerjakan selama 1 (satu) tahun / periode Jan-Des 2018;
4. Untuk *sheet* masing-masing jenjang jabatan terampil dan ahli tidak perlu diisi;
5. Hasil perhitungan formasi dapat dilihat pada *sheet* formasi;
6. Hasil penetapan formasi ditandatangani oleh Ketua/Kepala Pengadilan, di scan warna, dikirim beserta softcopy file/dokumen tersebut.
7. Sebagai bahan data dukung dalam pengisian formulir, silahkan unduh pula Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Arsiparis, shorturl.at/kHWX2; Pranata Komputer, http://tiny.cc/juknisprakom1; http://tiny.cc/juknisprakomMA Pustakawan, shorturl.at/dmB47 ; Perencana, shorturl.at/kOY58

- **Petunjuk Teknis Pengisian simulasi perhitungan beban kerja Pengelola Pengadaan Barang/Jasa**

1. Isi nama instansi/Kementerian/lembaga/satker;
2. Isi jumlah unit kerja yang dilayani;
3. Jumlah volume diisi dari kegiatan yang dikerjakan selama 1 (satu) tahun / periode Jan-Des 2018.

III. Jabatan Fungsional yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung RI

No	Nama Jabatan Fungsional	Ruang Lingkup Satuan Tugas	Link Regulasi Terkait
1	Analis Kepegawaian	Pusat dan Satker	shorturl.at/CEOU4; shorturl.at/hQ489; shorturl.at/bgjK3
2	Auditor	Pusat (Badan Pengawasan)	shorturl.at/hILW3;shorturl.at/hpKRU
3	Auditor Kepegawaian	Pusat (Badan Pengawasan)	shorturl.at/ahjCF;shorturl.at/guHMV
4	Analis Kebijakan	Pusat	shorturl.at/sIQV2; shorturl.at/fABRX
5	Arsiparis	Pusat dan Satker	shorturl.at/uwBL4; shorturl.at/nIN36;shorturl.at/kHWX2; shorturl.at/hoz12
6	Assessor SDM Aparatur	Pusat (Biro Kepegawaian BUA)	shorturl.at/EGQZ3; shorturl.at/dlqzA
7	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	Pusat dan Satker	shorturl.at/dzFIX ; shorturl.at/bdeAE
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Pusat	shorturl.at/buLX7 ; shorturl.at/jtwxW
9	Perencana	Pusat dan Satker	shorturl.at/cMN37 ; shorturl.at/kOY58
10	Peneliti	Pusat (Badan Litbang Diklat Kumdil)	shorturl.at/jtBO5 ; shorturl.at/lyLOT
11	Penerjemah	Pusat	shorturl.at/evTW6;shorturl.at/deRST
12	Pranata Humas	Pusat dan Satker	shorturl.at/mvAUY;shorturl.at/BIVZ0; shorturl.at/fikoV
13	Pranata Komputer	Pusat dan Satker	shorturl.at/bBNQV; shorturl.at/vxP46
14	Pustakawan	Pusat dan Satker	shorturl.at/iuyAW; shorturl.at/dmB47; shorturl.at/vCIN3
15	Widyaiswara	Pusat (Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan)	shorturl.at/BHIM7; shorturl.at/zDI27; shorturl.at/ioAN6

IV. Bahan Materi terkait

No	Nama File	Link terlampir
1	Paparan Analisis Jabatan	shorturl.at/axzOV
2	Penyusunan Kebutuhan Jumlah PNS	
3	Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional	
4	Peta Jabatan dan Analisis Jabatan Fungsional	

V. Contoh Template/ Format

No	Contoh Template/ Format	Link terlampir
1	Peta Jabatan	shorturl.at/oqrz5
2	Analisis Jabatan	shorturl.at/dALOW
3	Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional	shorturl.at/BHLZ7

VI. Langkah Penyusunan Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional

⌘ **Peta Jabatan**

- Lakukan inventarisasi setiap jabatan baik struktural ataupun fungsional pada masing-masing unit kerja (paling tinggi eselon II).
- Susun seluruh jabatan tersebut secara vertikal dan horisontal berdasarkan kedudukan setiap jabatan dalam unit kerja (paling tinggi eselon II). Gunakan struktur organisasi yang ada.
- Susun jumlah pegawai untuk setiap jabatan yang termasuk dalam unit kerja (paling tinggi eselon II).
- Peta jabatan yang tersusun akan menjelaskan susunan dan hubungan kerja setiap jabatan dalam unit kerja (paling tinggi eselon II)

⌘ **Analisis Jabatan**

- Lakukan pengisian data melalui formulir analisis jabatan dengan melakukan dengan melakukan pengamatan langsung, wawancara, dan atau/ penyebaran kuesioner kepada pemegang jabatan fungsional di unit kerja/ satker.
- Data-data yang diisi meliputi nama jabatan, kode jabatan, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggungjawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, dan resiko bahaya yang dituangkan ke dalam formulir analisis jabatan.

⌘ **Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional (secara umum)**

1. Menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan (unsur, sub unsur, dan butir kegiatan) masing-masing jenjang jabatan, yang dapat dinilai dengan angka kredit sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri PAN dan RB dan Perka dari masing-masing instansi pembina Jabatan Fungsional.
2. Menginventarisasi nilai angka kredit untuk masing-masing butir kegiatan.
3. Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1250 jam berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros.
4. Menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk), dengan cara membagi angka kredit butir kegiatan (Akb) masing-masing dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar jam kerja efektif.
5. Mengisi volume kegiatan dalam 1 tahun.
6. Menghitung waktu penyelesaian volume kegiatan (Wpv) dengan cara mengali waktu penyelesaian butir kegiatan (Wpk) dengan volume kegiatan dalam 1 tahun (V)
7. Menghitung jumlah kebutuhan JF dengan cara membagi jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan (Wpv) dengan 1.250